



**KOMPLEKSITAS KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PROSES  
DEMOKRATISASI DI FILIPINA**

***COMPLEXITY OF OLIGARCHIC RULE IN THE PROCESS OF  
DEMOCRATIZATION IN THE PHILIPPINES***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional  
dan mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Oleh**

**RAFLI ZULFIKAR  
NIM 090910101050**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**KOMPLEKSITAS KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PROSES  
DEMOKRATISASI DI FILIPINA**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional  
dan mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Oleh**

**RAFLI ZULFIKAR  
NIM 090910101050**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua  
Darmiyati dan Islan Hadi, adik Hisom Safrizal.

## **MOTTO**

*We removed the King but not the Monarchy,  
We removed the Oligarch but not the Oligarchy*  
(Yoes C Kenawas)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yoews Kenawas. Tulisan dalam media sosial Twitter pada jam 09:03 wib, tanggal 21 mei 2013

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafli Zulfikar

NIM : 090910101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: ” Kompleksitas Kekuasaan Oligarki Dalam Proses Demokratisasi Di Filipina” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2014

Yang menyatakan,

Rafli Zulfikar  
NIM 090910101050

**PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**KOMPLEKSITAS KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PROSES  
DEMOKRATISASI DI FILIPINA**

Oleh

Rafli Zulfikar  
NIM 090910101050

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, M.A., Ph.D

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Djoko Susilo, M.Si.

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 April 2014  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : LKPK

Tim Penguji  
Ketua,

**Drs. Himawan Bayu P., MA, Ph.D**

NIP 19610828 199201 1 001

Sekretaris I,

Sekretaris II,

**Drs. Sugivanto E.K MA, Ph.D**

NIP 19500428 197903 1 001

Anggota I,

**Drs. Djoko Susilo, M.Si.**

NIP 19590831 198902 1 001

Anggota II,

**Drs. Supriyadi, M.Si**

NIP 19580317 198503 1 003

**Drs. Alfani Jamil, M.Si**

NIP 19500408 197603 1 001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember,

**Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.**

NIP 19520727 198103 1 003

## RINGKASAN

**KOMPLEKSITAS KEKUASAAN OLIGARKI DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI FILIPINA;** Rafli Zulfikar, 090910101050, 2014; 106 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bentuk dan mekanisme bekerjanya oligarki di era demokrasi. Oligarki di Filipina muncul pada era kolonial yang dikarenakan tidak meratanya kepemilikan alat produksi yaitu tanah. Akibat tidak meratanya pembagian tanah, kekayaan sangat timpang dan muncul relasi yang asimetris antara tuan tanah dan buruh. Hal ini memunculkan dinasti kaya yang nantinya berpengaruh pada politik Filipina. Setelah kemerdekaan Filipina dari penjajahan kolonialisme Spanyol dan Amerika, oligarki muncul dengan bentuk politik dinasti yang tidak hanya berkuasa secara politik tetapi juga berkuasa pada sektor ekonomi di tingkat nasional. Hampir semua presiden Filipina adalah berasal dari dinasti politik.

Kemunculan oligarki di era kolonialisme, mendapatkan momentum konsolidasi ketika Filipina dibawah presiden Ferdinand Marcos, dimana bentuk sistem politik Filipina adalah otoriter dengan penerapan darurat militer (*Martial Law*). Di bawah rejim otoriter, oligarki terpusat pada Ferdinand Marcos sedangkan diluar lingkaran politik Ferdinand Marcos dan kroninya, negara melakukan represif dan mendisorganisasi rival politik melalui militer. Kebijakan industrialisasi di bawah rejim Marcos menjadikan Filipina sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan Asia Tenggara, tetapi kebijakan industrialisasi Marcos membutuhkan pembiayaan yang besar, salah satunya dari pinjaman dalam dan luar negeri. Pinjaman yang besar (*over borrowed*) memberikan beban ekonomi yang besar terhadap Filipina serta munculnya gerakan rakyat (*people power*) pada 1986 mengakibatkan jatuhnya rejim Marcos dan Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Pinjaman utang luar negeri berakibat pada ketentuan Filipina untuk mengadopsi penyesuaian struktural dengan melakukan liberalisasi dan privatisasi sebagai upaya penanggulangan krisis.

Memasuki era transisi demokrasi, oligarki yang semula terkonsolidasi dibawah rejim otoriter mengalami perpecahan. Pada perjalanannya mulai era Corazon Aquino, Fidel Ramos, sampai Joseph Estrada, negara Filipina masih mengalami kegagalan melakukan konsolidasi. Hal ini dapat diterjemahkan pada peristiwa *people power* yang menjatuhkan presiden Joseph Estrada pada tahun 2001. Begitu juga kondisi oligarki Filipina, ekonomi yang tidak merata dan masih kuatnya politik dinasti di era demokratis menandakan oligarki masih kuat di Filipina.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori dan satu konsep antara lain *pertama*, Politik Patron Klien (*patronage politic*) oleh James Scoot, yang menyatakan relasi yang asimetris yang dikarenakan kepemilikan alat produksi timpang dalam hal ini adalah kepemilikan akan tanah mengakibatkan hubungan yang

patron klien. Dengan pendekatan Scoot, peneliti dapat membaca kemunculan dan relasi yang patron klien di Filipina, serta dapat menjelaskan kemunculan oligarki. Pendekatan kedua adalah Teori Negara dan Kelas yang dipopulerkan oleh Ralph Milliband. Dalam teori Negara dan Kelas, negara bukan entitas yang muncul karena kontrak sosial, tetapi muncul karena kepentingan kelas. Negara merupakan alat dari kelas dalam hal ini adalah oligarki untuk menyelenggarakan politik pembelaan atas kekayaan (*politics of wealth defence*) berupa akumulasi kekayaan. Pendekatan ketiga adalah konsep *oligarki complex power* (OCP) dimana dalam konsep dijelaskan bahwa oligarki dalam rejim demokratis berubah menjadi semakin kompleks dan terdesentralisasi tidak hanya pada penguasa tetapi juga muncul di parlemen dan daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa oligarki di era demokrasi pada pemerintahan Gloriya Maccapgal Arroyo mengikuti alur dari OCP yaitu terjadi desentralisasi oligarki. Tidak hanya terjadi pada presiden Arroyo dan Kroni, Oligarki juga terjadi pada parlemen dan pemerintahan lokal. Oligarki pada parlemen terjadi salah satunya dengan politik *pork barely* yaitu dana aspirasi yang diselewengkan melalui kontraktor fiktif sedangkan pada pemerintahan lokal, oligarki terjadi karena kuatnya dinasti di daerah serta memonopoli kekerasan seperti yang terjadi pada daerah Mindanao. Setidaknya dapat dipetakan menjadi dua bentuk oligarki, pertama oligarki politik dimana hampir sebagian besar pimpinan partai, senator, kongres serta presiden adalah berasal dari politik dinasti. Kedua, oligarki ekonomi yaitu kebijakan privatisasi dan liberalisasi ternyata tidak menghasilkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan cita-cita diadopsinya penyesuaian struktural oleh IMF dan World Bank. Penyesuaian struktural terutama privatisasi menjadi mekanisme transfer kepemilikan yang semula dikuasai oleh negara menjadi dikuasai oleh oligarki. Pada pemerintahan Arroyo, 31 persen ekonomi Filipina dikuasai oleh 40 konglomerat Filipina selebihnya berasal dari rakyat. Hal ini menandakan ketimpangan yang besar karena oligarki.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya karya tulis ilmiah yang berjudul “**Kompleksitas Kekuasaan Oligarki Dalam Proses Demokratisasi Di Filipina**”. Karya tulis ini merupakan kajian tentang oligarki dalam ilmu politik terutama dalam studi Asia Tenggara. Sebuah kondisi yang terus berevolusi dalam sistem politik, tidak hanya di Filipina yang menjadi fokus dalam skripsi ini tetapi juga terjadi hampir diseluruh negara Asia Tenggara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;
2. Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma., MA.,P.hD selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas semua transfer ilmu, nasehat, kesabaran dan ketelatenan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas ketelatenan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
4. Dra. Sri Yuniati, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
5. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
6. Seluruh Dosen di jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di jurusan ini;
7. Keluarga Besar HMI Cabang Jember Komisariat FISIPOL, terima kasih atas pembelajaran dan kekeluargaannya. YAKUSA
8. Riska Oktavina, Edwin Prasetiawan, Nur Halimah, Rezel Nurullah, Inesha Syayadi, Durrotul Aini, Fazsa Bacti, Priyo Nugroho (alm), Brilian Budi

Nurani, Rendhy Mahardhika serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam kebersamaan yang saling menguatkan.

9. Teman-teman HI 2009. Terima kasih atas kebersamaan dalam perbedaan ini.

Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman berharga ini.

10. Ruslan, Irham, Kaka, Wo, Alfian, Irfan, Selvi, Indah, Rohman, Heri, dan Eksponen kepengurusan Komfis 2012. Yakin bahwa usaha kita pasti sampai.

11. Terakhir, adinda Dwi Nofitasari yang kuat dan menguatkan.

Tidak ada kata sempurna begitu pula dengan tulisan ini. Penulis dengan senang hati membuka ruang bagi ajakan diskusi dan kritik terhadap tulisan ini. Semoga bermanfaat terutama untuk dialektika dalam kajian perbandingan politik, terlepas dari banyak kekurangan.

Jember, 20 Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar belakang</b> .....	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b> .....	7
1.2.1 Batasan Materi.....	7
1.2.2 Batasan Waktu.....	8
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	9
1.5.1 Teori Negara dan Kelas .....	10
1.5.2 Konsep Oligarchy Complex Power (OCP).....	12
1.5.3 Teori Patronase Politik ( <i>Patronage politic</i> ) .....	18

<b>1.6</b>	<b>Studi Terdahulu</b> .....	23
<b>1.7</b>	<b>Argumen Utama</b> .....	25
<b>1.8</b>	<b>Metode Penelitian</b> .....	25
	1.8.1 Teknik pengumpulan data .....	25
	1.8.2 Teknik analisis data .....	26
<b>1.9</b>	<b>Sistematika Penulisan</b> .....	26
<b>BAB 2. GAMBARAN UMUM NEGARA FILIPINA</b> .....		27
<b>2.1</b>	<b>Kondisi Geografi Filipina</b> .....	27
<b>2.2</b>	<b>Sejarah Filipina</b> .....	28
<b>2.3</b>	<b>Konstitusi Filipina</b> .....	31
<b>2.4</b>	<b>Sistem Politik dan Pemerintahan Filipina</b> .....	33
	2.5.1 Lembaga Eksekutif .....	34
	2.5.2 Lembaga Legislatif .....	35
	2.5.3 Lembaga Yudikatif .....	36
	2.5.4 Politik Lokal .....	38
<b>2.5</b>	<b>Sistem Kepartaian Filipina</b> .....	39
<b>BAB 3 GENEALOGIS POLITIK OLIGARKI FILIPINA</b> .....		43
<b>3.1</b>	<b>Oligarki Pra Autoritarian Rezim : Kolonialisme dan Kemunculan awal Oligarki</b> .....	43
<b>3.2</b>	<b>Politik Autoritarian Rezim Marcos: Menguatnya Negara, Subordinasi, Represif dan reformasi konstitusi</b> .....	46
<b>3.3</b>	<b>Ekonomi Politik Autortitarian Rezim Marcos : Kapitalisme Negara</b>	51
<b>3.4</b>	<b>Terbentuknya Relasi oligarki Politico Buisness</b> .....	60

<b>BAB 4. MEKANISME BEKERJANYA KEKEUASAAN OLIGARKI PADA TRANSISI DEMOKRASI FILIPINA ERA GLORIYA MACCAPAGAL ARROYO .....</b>	<b>69</b>
<b>4.1 Pemerintahan Era Gloriya Maccapagal Arroyo .....</b>	<b>69</b>
4.1.1 Konstelasi Politik Era Gloriya Maccapagal Arroyo .....	70
4.1.2 Kondisi Ekonomi Politik Era Gloriya Macapagal Arroyo .....	75
<b>4.2 Kompleksitas Kekuasaan Bisnis–Politik Era Presiden Gloriya Maccapagal Arroyo.....</b>	<b>79</b>
4.2.1 Kompleksitas Kekuasaan Bisnis Politik Di Eksekutif: Politik Dana Pupuk ( <i>The Fertilizer Fund Scam</i> ).....	79
4.2.2 Kompleksitas Kekuasaan di Parlemen: Kasus <i>Priority         Development Assistance Fund (PDAF) atau Pork Barrel</i> .....	80
4.2.3 Kompleksitas Kekuasaan Bisnis Politik di Pemerintah Lokal .....	84
4.2.4 Relasi Konglomerasi dengan Politik ( <i>Buisness and Political         Complex</i> ) di era Gloriya Maccapagal Arroyo .....	86
<b>4.3 Pola Transformasi Oligarki.....</b>	<b>89</b>
<b>4.4 Kompleksitas Oligarki Pada Pemerintahan Demorkatis: Rezim Maccapagal Arroyo.....</b>	<b>95</b>
4.4.1 Oligarki Politik .....	96
4.4.2 Oligarki Ekonomi .....	98
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>5.2 Rekomendasi Kebijakan.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Transformasi politik oligarki .....	16
Tabel 3. 1 Indikator Hutang Negara Asia Tenggara 1986.....	52
Tabel 3.2 GNP and Population, 1962-1986 (constant 1985 pesos) .....	55
Tabel 3.3 GDP and Population .....	57
Tabel 3.5 rasio distribusi pendapatan keluarga Filipina 1956-1985 .....	58
Tabel 4.1. Kinerja Ekonomi pertahun 2000 sampai tahun 2010.....	76
Tabel 4.2 Sepuluh peringkat perusahaan terbaik Filipina 2004.....	78
Tabel 4.3 Alur Transformasi Oligarki Sistem Pemerintahan Filipina .....	89
Tabel 4.4 Keluarga dan Industri di Filipina .....	99
Tabel 4.5 Distribusi pendapatan 1% keluarga berpenghasilan tertinggi.....	102

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Operasional konsep <i>oligarchy complex power</i> (OCP) .....	21
Gambar 2.1 Peta Filipina.....	27
Gambar 3.4 Jejaring Relasi Oligarki Politico Business di bawah Rezim Otoriter	63
Gambar 4.1. Data Pemilu Senat Tahun 2001 .....	70
Gambar 4.2. Data Politik Legislatif 200 .....	71
Gambar 4.3 Data Politik Legislatif 2004 .....	72
Gambar 4.4. Modus operandi politik PDAF .....	81
Gambar 4.5 Anggota Legislatif dalam Politik PDAF .....	83
Gambar 4.6 Perensetase pendapatan ekonomi negara Filipina.....	101